



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LAKIP)**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN PASAMAN**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berpedoman kepada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman mencoba menerapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan kinerja berisikan laporan tingkat capaian kinerja kegiatan yang meliputi target yang akan dicapai dan realisasinya, permasalahan dan rekomendasi kedepannya yang berguna untuk keberlanjutan program dan kegiatan tahun 2024.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman ini dibuat dan sebagai bahan dalam penilaian kinerja terima kasih.

Lubuk Sikaping, Januari 2024

**Kepala Dinas PRKPPLH
Kabupaten Pasaman**



**SILFIA EVAYANTI, S.Pi, MM
NIP. 19680105 199403 2 004**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Dasar Hukum | 1 |
| B. Uraian Singkat Tentang Tugas dan Fungsi Instansi | 1 |
| D. Keunggulan Lainnya yang dimiliki Instansi | 3 |
| E. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Instansi | 5 |
| F. Permasalahan Utama yang sedang dihadapi Organisasi | 12 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis | 13 |
| B. Perjanjian Kinerja | 26 |
| C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | 25 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 36 |
| B. Realisasi Anggaran | 48 |
| BAB IV PENUTUP | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum (Pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah)

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

B. Uraian Singkat Tentang Tugas dan Fungsi Instansi

1. Tugas Pokok Instansi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman, dinyatakan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman merupakan unsur pelaksana koordinasi pemerintah daerah dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman mempunyai tugas pokok: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

2. Fungsi Instansi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

3. Dasar Hukum Tupoksi, Program dan Kegiatan

- A. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- B. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

C. Keunggulan Lainnya yang dimiliki Instansi

1. Laboratorium Lingkungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman telah memiliki gedung Laboratorium Lingkungan yang tetap, dan ini merupakan salah satu penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah maupun setiap kegiatan usaha yang berpengaruh terhadap lingkungan.
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman, memiliki kemampuan menggalang *stakeholder* dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati Pasaman yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Komisi Penilaian Amdal (KPA)

Keputusan Bupati Pasaman Nomor:188.45/78/BUP-PAS/2020 tentang Pembentukan Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Pasaman. Komisi Penilaian Amdal (KPA) mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Amdal dan RKL-RPL.

4. Bank Sampah

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan membentuk bank sampah yang terdapat di beberapa daerah di kabupaten pasaman, seperti :

- Kecamatan Bonjol : Bank Sampah Aia Malambuih, Berkah Mandiri dan Kamehi
- Kecamatan Simpati : Bank Sampah Simpang Peduli
- Kecamatan Lubuk Sikaping : Bank Sampah UD Zainal, Alai indah dan Saiyo Aia Kasai
- Kecamatan Padang Gelugur : Bank Sampah Kap Link (Kami Peduli Lingkungan) dan Induk Indah Basamo
- Kecamatan Duo Koto : Bank Sampah Pejuang Receh

5. Taman Hutan Kota

Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan taman. Taman Hutan Kota di Kabupaten Pasaman memiliki luas 2,41 Ha, disana juga digunakan sebagai tempat pembibitan dan pembuatan kompos.

6. Taman Batas Kota

- Batas kota di Padang Sawah
- Batas kota di Kumpulan
- Batas kota di Duo Koto
- Batas kota Lubuk Sikaping

- Taman Terminal Panti
 - Taman TPA Labuai Bonjol
7. Memiliki TPA Lambak di Kecamatan Panti yang sudah memiliki Sertifikat (Belum dibangun)

D. Sumber Daya Manusia yang dimiliki instansi.

1. Pejabat Struktural sebanyak 13 orang dan Fungsional Pelaksana sebanyak 36 Orang dimana latar belakang pejabat struktural dan fungsional ini sebagian besar adalah tenaga teknis dan sebagian lagi berlatar belakang sosial yang belum relevan dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman
2. Dalam pelaksanaan pemantauan serta pengawasan terhadap lingkungan yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Telah melaksanakan kegiatan yang pada prinsipnya menjaga kelestarian lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman
3. Memiliki Aparatur yang sedikit berlatar belakang pendidikan teknis baik dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang telah mengikuti Diklat, dimana dari 36 orang staf yang ada saat ini, beberapa orang diantaranya memiliki ilmu dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup saat ini aktif dalam menjalankan tugas. Sebagian lagi dari staf yang ada merupakan tenaga administrasi.
4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman saat ini belum mencukupi dari sumber daya manusia yang ada setelah dilihat dari nomenklatur yang ada maka dibutuhkan penambahan pegawai lebih kurang 88 orang.

- Bidang sekretariat dibutuhkan penambahan pegawai sebanyak 24 orang, 18 orang dari bagian umum, 4 orang dari bagian keuangan dan 2 orang dari bagian evalop
- Bidang Lingkungan Hidup dibutuhkan penambahan pegawai sebanyak 15 orang, terdiri 7 orang untuk pengawasan lingkungan, 4 orang penyuluhan lingkungan dan 4 orang untuk pengendalian lingkungan.
- Bidang Kebersihan dan Pertamanan dibutuhkan penambahan pegawai sebanyak 18 orang, terdiri dari bagian kebersihan sebanyak 8 orang, pertamanan sebanyak 5 orang dan sarana dan prasarana sebanyak 5 orang.
- Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibutuhkan penambahan pegawai sebanyak 11 orang, terdiri dari bagian perencanaan 1 orang, bagian perumahan rakyat sebanyak 7 orang dan kawasan permukiman sebanyak 3 orang.
- Bidang Perhubungan dibutuhkan penambahan pegawai sebanyak 20 orang, terdiri dari seksi pengembangan dan keselamatan lalin dan angkutan jalan sebanyak 4 orang, seksi lalu lintas dan angkutan jalan sebanyak 6 orang, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 4 orang dan UPT Penerangan Jalan Umum sebanyak 6 orang.

Dari kesemuanya dilihat dari pola kebutuhan dinas dalam bidang sumber daya manusia berdasarkan analisis jabatan.

Rekapitulasi jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural/Fungsional Golongan/Pangkat dan Pendidikan dapat dilihat pada **Tabel 1.1**.

Tabel 1.1
Jabatan Struktural, Fungsional, Golongan, Pangkat dan Pendidikan

| No | Nama | L/P | Jabatan | Golongan/Pangkat | Pendidikan | Diklat Kepemimpinan yang Diikuti |
|----------------------|----------------------------------|-----|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. STRUKTURAL | | | | | | |
| 1 | SILFIA EVAYANTI, S.Pi, MM | L | Kepala Dinas | IV/c, Pembina Utama Muda | S2 Magister Manajemen | SPAMEN 2019 |
| 2 | dr. RAHADIAN SURYANTA, M.KM | L | Sekretaris | IV/a, Pembina | S2 Magister Kesehatan Masyarakat | PIM IV 2014 |
| 3 | ENDANG SUSILOWATI, ST, M.Si | P | Kabid Lingkungan Hidup | IV/a, Pembina | S2 Magister Sains | PIM III |
| 4 | YUSRIZAL, SH | L | Kabid Kebersihan dan Pertamanan | IV/a, Pembina | S1 Hukum | |
| 5 | KHAIRUL AMRI, ST | L | Kabid PRKP | III/d, Penata Tk. I | S1 Teknik Sipil | |
| 6 | HENDRIZAL,SH | L | Kabid Perhubungan | III/d, Penata Tk. I | S1 Hukum | |
| 7 | ELYA DESNUR | P | Kasubag Keuangan | III/d, Penata Tk. I | SMA | Adum 1999 |
| 8 | YULIASMA | P | Kasubag Umum dan Kepegawaian | III/d, Penata Tk. I | SPMA | Adum 2000 |
| 9 | ELESTUKI, SH | L | Kasi Lalin & Angkutan Jalan | III/c, Penata | S1 Hukum | |
| 10 | MUSRIWAN, SE | L | Kasi Pengembangan dan Keselamatan | III/c, Penata | S1 Ekonomi | |
| 11 | ANDRIA MEIRIZA, SE | P | Kasubag Program dan Evalop | III/b, Penata Muda Tk. I | S1 Ekonomi | |
| 12 | ADRIMANIZAL, S.Si | L | Kepala UPT Laboratorium | III/d, Penata Tk. I | S1 Kimia | |
| 13 | HENDRI YANTO, ST | L | Kepala UPT Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | III/d, Penata Tk. I | S1 Teknik Industri | |
| B. PELAKSANA | | | | | | |
| 14 | SYAMSIRWAN,SH | L | Penata Ruang Ahli Muda | III/d, Penata Tk. I | S1 Hukum | |
| 15 | FREDY KURNIAWAN, SKM | L | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda | III/d, Penata Tk. I | S1 Kesehatan Masyarakat | Diklat PIM IV |
| 16 | HARI SANTOSO, SKM | L | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda | III/d, Penata Tk I | S1 Kesehatan Masyarakat | |
| 17 | SUBHANDI, ST | L | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda | III/d, Penata Tk I | S1 Teknik Lingkungan | PIM Tk. IV |
| 18 | ELI SUNARTI, SP | P | Penyelidik Bumi Ahli Muda | III/d, Penata Tk.I | S1 Pertanian | Adum 2000 |
| 19 | GABENA, SH | P | Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda | III/c, Penata | S1 Hukum | |
| 20 | NIKA PUTRI, ST. MIL | P | Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan | III/c, Penata | S2 Magister Ilmu Lingkungan 2020 | |
| 21 | JUNILDO, SH | L | Perencana Ahli Muda | III/b, Penata Muda Tk. I | S1 Hukum | |
| 22 | IRWANDI, ST | L | Pelaksana | III/d, Penata Tk.I | S.1 Teknik | |
| 23 | SUSY ANGGRAINI, ST | P | Pelaksana | III/d, Penata Tk.I | S.1 Teknik Sipil | |
| 24 | ALDESRA YENNI, SH | P | Analisis Taman | III/c, Penata | S1 Hukum | |
| 25 | ALMAHENDRI, ST | L | Pengawas Kelistrikan | III/c, Penata | S.1 Teknik Elektro | |
| 26 | MIA FIRAHAYU, S.Si | P | Penyusun Rencana Tatalaksana | III/c, Penata | S1 Kimia | |
| 27 | HENDRI RIZALDI | L | Penagih Retribusi | III/b, Penata Muda Tk. I | SMA | |
| 28 | AMLI | L | Pengadministrasi Umum | III/b, Penata Muda Tk. I | STM Bangunan | |
| 29 | MARITA TARENA, SH | P | Analisis Tata Usaha | III/b, Penata Muda Tk. I | S1 Hukum | |
| 30 | RICE YUNIATRI, A.Md | P | Pengelola Data | III/b, Penata Muda Tk. I | D.III Akutansi | |
| 31 | JUNAI, Amd | L | Pengelola Dokumen | III/a, Penata Muda | D III Kesehatan Lingkungan | |
| 32 | RINGGO RENTIA | L | Penagih Retribusi | III/a, Penata Muda | SMA | |
| 33 | NASRILYAN | L | Operator Terminal | III/a, Penata Muda | SMA | |
| 34 | YULIUS SUSANTO | L | Operator Terminal | III/a, Penata Muda | SMA | |
| 35 | SYAFRIAL | L | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana | III/a, Penata Muda | MA | |
| 36 | HENDRA | L | Operator Terminal | III/a, Penata Muda | SMA | |
| 37 | MEFKI RIANDEHI, S.Tr.Tra | L | Penelaah Teknis Kebijakan | III/a, | D-IV Transportasi Darat | |
| 38 | YOEB MITHA MAULIDINA.M, S.Tr.Tra | P | Penelaah Teknis Kebijakan | III/a, | D-IV Transportasi Darat | |
| 39 | FARIZAL ISKANDAR | L | Pranata Taman | II/d, Pegatur Tk. I | SMA | |
| 40 | RUSMAN DEDI | L | Petugas Keamanan | II/d, Pegatur Tk. I | SMA | |
| 41 | MUZAKIR | L | Teknisi Listrik dan Jaringan | II/c, Pengatur | Paket C | |
| 42 | JONAI | L | Pengemudi | II/c, Pengatur | Paket C | |
| 43 | INDRA SAPUTRA | L | Pengemudi | II/c, Pengatur | Paket C | |
| 44 | ANGGA ARRYA PABAYO, A.Md.Tra | L | Pengelola Terminal | II/c, Pengatur | D.III Manajemen Trasportasi Jalan | |
| 45 | ANGGUN WULANSARI, A.Md.Tra | P | Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan | II/c, Pengatur | D.III Manajemen Trasportasi Jalan | |
| 46 | ANGGI ZASKIA RAMADHANI, A.Md.Tra | P | Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat | II/c | D.III Manajemen Trasportasi Jalan | |
| 47 | AGIL AHDHA NUZIL, A.Md.Tra | L | Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat | II/c | D.III Manajemen Trasportasi Jalan | |
| 48 | AHMAD HARUN, A.Md PKB | L | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana | II/b, Pengatur Muda Tk. I | D-II Penguji Kendaraan Bermotor | |
| 49 | ROZI SAFANI | L | Pengemudi | I/c, Juru | SLTP | |

Selain PNS Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup juga mempunyai tenaga honor daerah dan kontrak untuk pelaksana kebersihan dan Pertamanan, dapat dilihat pada **Tabel 1.2.**

TABEL 1.2

Daftar Honor Daerah dan Tenaga Kontrak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

| No | NAMA | L/P | JABATAN | PENEMPATAN | No | NAMA | L/P | JABATAN | PENEMPATAN |
|----|---------------------------|-----|---------------------|---------------|-----|----------------------|-----|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ZALMI SYAFARDI | L | Honor Daerah | Bidang LH | 73 | AMELIA PUTRI UTAMA | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 2 | IRWANDI | L | Honor Daerah | Bidang KP | 74 | ANDRE NOVALDO | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 3 | SALMAN NASUTION | L | Honor Daerah | Bidang KP | 75 | AZWARNI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 4 | AHMAD SARI | P | Honor Daerah | Bidang KP | 76 | APRINA | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 5 | AHMAD YUNUS | L | Honor Daerah | Bidang KP | 77 | ATA WJAYA | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 6 | YASRI NALDI | L | Honor Daerah | Bidang KP | 78 | DEDY AZWAR | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 7 | RAHMAT DIAN | L | Honor Daerah | Bidang KP | 79 | DESI YULIADI SUSANTI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 8 | MONA PUSPITA, S.Pd | P | Administrasi | Sekretariat | 80 | DESI YULISANTI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 9 | KHAIRINISYAK, A.md, Keb | L | Administrasi | Sekretariat | 81 | DESMARITA | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 10 | REZI APRIANI, ST | L | Administrasi | Sekretariat | 82 | DESRI HENDRI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 11 | RIA AFRIANI, S.E | L | Administrasi | Sekretariat | 83 | DIMAS SATRIA | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 12 | KRESSIA MUSTIKA, S.E | L | Administrasi | Sekretariat | 84 | EDI SUHAIMI | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 13 | DODDY HIDAYAT, SH | L | Administrasi | Sekretariat | 85 | EFI FITRA | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 14 | M. ARIF, S.E | L | Administrasi | Sekretariat | 86 | ERIKA | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 15 | EDISON | L | Administrasi | Sekretariat | 87 | ERNI YUSNITA | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 16 | SYNTA MARISSA | L | Administrasi | Sekretariat | 88 | FAJRI ISKA | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 17 | IRWANDI | L | Kontrak Sopir | Sekretariat | 89 | FAJRI | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 18 | ANDREA MAHENDRA | L | Kontrak Sopir | Sekretariat | 90 | FERDY VEBRIANT,A.md | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 19 | ADRY HIDAYAT. E, S.Kom | L | Kontrak Sopir | Sekretariat | 91 | FITRI DARMI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 20 | ACEP WAHYU, SH | L | Kontrak Sopir | Sekretariat | 92 | GUZAIMAH | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 21 | YOGA MASTARI | L | Kontrak Sopir | Sekretariat | 93 | HARMA DEFI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 22 | RONI SASTRA | L | Kontrak Satpam | Sekretariat | 94 | HENDRI | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 23 | ROMI AMIMANDA, SH | L | Kontrak Satpam | Sekretariat | 95 | HERISKA KURNIAWAN | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 24 | INGRA DESMANTO | L | Kontrak Satpam | Sekretariat | 96 | HOTMEDA | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 25 | DAYU LEXSI | L | Kontrak Satpam | Sekretariat | 97 | ISRAWANTO | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 26 | WINDI SEPTIA DINGSIH, S.E | P | Administrasi | Bidang LH | 98 | JENDRAWASIH | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 27 | INDRA SAPUTRA | L | Administrasi | Bidang Perhub | 99 | JIFRIZAL | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 28 | LAILA SALSABILLA | P | Administrasi | Bidang Perhub | 100 | JOS HENDRI | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 29 | HENDRA AHMARDI | L | Administrasi | Bidang Perhub | 101 | JOY | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 30 | FRIYANTO WAHYUDI | L | Administrasi | Bidang Perhub | 102 | JULNAIDI | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 31 | EGI PRATAMA Z | P | Administrasi | Bidang Perhub | 103 | JUSMANIAR | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 32 | RAMADANI | L | Administrasi | Bidang Perhub | 104 | JUSNI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 33 | SILVIA SONA. Y.A.md, Tra | P | Administrasi | Bidang Perhub | 105 | MAIRIZA | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 34 | BAYU ANGGARA | L | Administrasi | Bidang Perhub | 106 | MAULANA R | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 35 | DEVIT FEBRIAN, S.H | L | Administrasi | Bidang Perhub | 107 | MEDIA WATI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 36 | HENDRA CIPTA | L | Kontrak Sopir | Bidang Perhub | 108 | MEISITAH | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 37 | RAHMAT FALERI | L | Petugas Terminal | Bidang Perhub | 109 | MELKI | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 38 | MAIDIL EDRINALDO | L | Petugas Terminal | Bidang Perhub | 110 | MIRNA YANTI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 39 | KEVIN BRAMANTIA. N, S.H | L | Petugas Terminal | Bidang Perhub | 111 | MONA LISA | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 40 | ANTON RAHMAT ALL. S | L | Petugas Terminal | Bidang Perhub | 112 | NAJAMUDDIN | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 41 | DIDI KARYANTO | L | Petugas Terminal | Bidang Perhub | 113 | NASRIL | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 42 | MOMON HANAFI | L | Petugas Terminal | Bidang Perhub | 114 | NOFES SAPUTRA | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 43 | FEBRIKO | L | Kontrak K3 Terminal | Bidang Perhub | 115 | NOFI ALWI | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 44 | MUHAMMAD IKBAL, S.H | L | Kontrak K3 Terminal | Bidang Perhub | 116 | NOVIA RIONA | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 45 | RAHMAT ILAHI | L | Kontrak K3 Terminal | Bidang Perhub | 117 | NOVIANDRI | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 46 | MUHAMMAD. SYAFEI, S.E | L | Administrasi | Bidang PRKP | 118 | NOVRI MALIDA ASTUTI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 47 | NOVALIA PUTRI, S.T | P | Administrasi | Bidang PRKP | 119 | NURMI YANTI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 48 | EGA ADILLA, S.E | L | Administrasi | Bidang PRKP | 120 | OLYIYATI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 49 | RIAN BILHAQI, S.E | L | Administrasi | Bidang PRKP | 121 | PETRIANI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 50 | MAYANG GUSWIDA, S.H | P | Administrasi | Bidang KP | 122 | RAHMAD JIMIL ,SH | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 51 | MUJE MALONDA, S.E | P | Administrasi | Bidang KP | 123 | RAHMAT IRWAN ALI | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 52 | YESI OKTAVIA,A.P | P | Administrasi | Bidang KP | 124 | RIFKI WAHYUDI,S.Pd | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 53 | SEPTIA HERMINAWATI, S.Si | L | Administrasi | UPT Labor | 125 | ROMI DENI SAPUTRA | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 54 | NURHIDAYAH,S.Si | P | Administrasi | UPT Labor | 126 | RONI FASLA | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 55 | RENDI HONO HAMBORO W | L | Kontrak Teknis PKB | UPT PKB | 127 | RONNI CANDRA | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 56 | RITA WULANDARI | P | Kontrak Teknis PKB | UPT PKB | 128 | SATRINA | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 57 | RIKO ARNANDO PUTRA | L | Kontrak Teknis PKB | UPT PKB | 129 | SEPPI HARMI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 58 | DEMARTEN | L | Kontrak K3 PKB | UPT PKB | 130 | SUSI WARTI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 59 | PIGA BUGIARTO, A.md | L | Administrasi | UPT PJU | 131 | SYAHRAL | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 60 | LIDYA | P | Administrasi | UPT PJU | 132 | TASNIM | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|---|------------------------|-----------|-----|------------------|---|--------------------|-----------|
| 61 | REVIAN MAIRANDI | L | Kontrak Teknis Traffic | UPT PJU | 133 | TONIEKA PUTRA | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 62 | IRWAN RAMADANI, S.H | L | Kontrak Teknis Traffic | UPT PJU | 134 | WILLY OKTAVIANUS | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 63 | INDERA WARMAN | L | Kontrak PJU | UPT PJU | 135 | YASRA | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 64 | SYAFJONI IRIANTO | L | Kontrak PJU | UPT PJU | 136 | YUFRIZAL | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 65 | IRFAN AMAR | L | Kontrak PJU | UPT PJU | 137 | YULATRI | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 66 | ANDRIAN | L | Kontrak PJU | UPT PJU | 138 | YULZEDRI | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 67 | RAMA FERMANA | L | Kontrak Sopir | UPT PJU | 139 | YUSNIMAR | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 68 | AFRID WARDANIS | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP | 140 | YUSRANI | P | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 69 | AGUSMANTO | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP | 141 | YUSRAN | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 70 | AHMAD PAISAL | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP | 142 | ZULFA HENDRI | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 71 | ALFIAN | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP | 143 | ZULFIAN | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP |
| 72 | AMARIZAL | L | Kontrak Kebersihan | Bidang KP | | | | | |

E. Permasalahan Utama yang sedang dihadapi Organisasi

Sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Pasaman dan pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup saat ini, yang menjadi isu strategis saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Kerusakan Daerah Resapan Air (*catchment area*)
- b. Alih Fungsi Lahan (Deforestasi)
- c. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
- d. Terancamnya ekosistem
- e. Kawasan permukiman kumuh
- f. Besarnya timbulan Volume sampah
- g. Perubahan iklim
- h. Besarnya data Backlog masyarakat yang memiliki perumahan tidak layak huni (Daftar tunggu RTLH)
- i. Anggaran operasional kurang memadai
- j. Kurangnya sumber daya manusia untuk pengelola lingkungan dan kawasan permukiman
- k. Pencemaran oleh sampah domestik di badan perairan
- l. Minimnya sarana dan prasarana persampahan
- m. Belum ada TPA sanitari landfill
- n. Banyaknya Nagari yang membuat container untuk TPS sementara anggaran untuk penambahan truk Armroll tidak tersedia
- o. Tidak ada penambahan Dump Truck pengangkut sampah
- p. Masih banyak kendaraan yang Over Dimension Over Load (ODOL)
- q. Belum tuntasnya penataan parkir pada pasar-pasar yang berada disepanjang jalan utama / jalan Nasional, khususnya di Kec. Panti dan Rao sehingga menghambat kelancaran arus lalu lintas angkutan orang dan barang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 diuraikan mengenai evaluasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman sebagai penjabaran pelaksanaan misi

dalam pencapaian visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan LAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman 2021-2026, sehingga LAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Tahun 2023 merupakan pengukuran tahun ketiga dari RPJMD dan Tahun kedua di Renstra 2021-2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman.

2. Visi Dan Misi OPD

a. Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman dan melihat isu strategis yang ada serta mempedomani Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman, maka yang menjadi visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah:

“Terwujudnya Penataan Kawasan Permukiman dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, serta meningkatnya kinerja Perhubungan untuk mencapai masyarakat yang lebih baik dan bermartabat”

Pernyataan visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

- 1) Masyarakat yang lebih baik dan bermartabat adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang aman, makmur dan sentosa yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat akan perumahan yang layak untuk peningkatan kualitas hidup.
- 2) Meningkatnya kinerja Perhubungan dengan arti kata meningkatnya layanan angkutan umum ke setiap nagari, sehingga masyarakat akan lebih mudah melakukan aktifitas untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat.
- 3) Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik mengandung bahwa dengan pemanfaatan sumber daya alam secara profesional serta dengan melakukan pembangunan yang berkelanjutan akan mampu mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dari isu pencapaian Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup tersebut, maka dirumuskan 4 (empat) Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup yaitu :

- ***Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.***

Dalam rangka pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh dan

Peningkatan perbaikan kualitas penataan bangunan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

- ***Meningkatkan ketaatan semua pihak terhadap peraturan perundang-undangan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup.***

Untuk meminimalisir dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pembangunan yang dikelola/dilaksanakan oleh instansi pemerintah, investor / pengusaha / masyarakat, maka di butuhkan sikap positif terhadap aturan-aturan yang ada sehingga lingkungan hidup di Pasaman tidak terganggu.

- ***Meningkatkan jalan yang berkeselamatan***

Seiring dengan bertambahnya penduduk maka akan bertambah juga kebutuhan masyarakat akan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan. Untuk menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan tersebut sangat dibutuhkan perlengkapan jalan yang memadai seperti rambu-rambu, marka jalan dan lain-lain. Dan juga sangat perlu untuk melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor sehingga masyarakat tidak ragu untuk menggunakan jasa angkutan umum.

- ***Meningkatkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.***

Bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan bertambahnya kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan sehingga perlu dilakukan penataan, pengawasan dan pengendalian lingkungan yang pada

akhirnya berdampak terhadap kenyamanan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

3. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Penetapan tujuan didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan dengan tujuan untuk memberikan arahan dalam menyusun perencanaan yang berkualitas oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman guna mewujudkan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Pasaman. Tujuan tersebut akan terwujud melalui penentuan sasaran yang ditetapkan secara nyata, spesifik dan terukur setiap tahunnya.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman menunjukkan bagaimana cara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Tahun 2021 - 2026, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Tahun 2021 - 2026 selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas

RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan penentuan beberapa alternatif strategi pada lampiran dokumen ini, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|--|--|
| Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar | Mewujudkan capaian SPM layanan dasar bidang Perumahan Rakyat | 1.1 Meningkatkan ketersediaan fasilitas layanan dasar | 1.1 Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar |
| | | 1.2 Meningkatkan kualitas layanan dasar | 1.2 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan dasar |
| | | 1.3 Mempersiapkan Pasaman sebagai daerah tanggap bencana | 1.3 Meningkatkan SDM layanan dasar |
| | | | 1.4 Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar |
| | | | 1.5 Meningkatkan mitigasi bencana |
| | | | 1.6 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kebencanaan |

| | | | | | |
|---|---|-----|--|---|---|
| | | | 1.7 | Meningkatkan kualitas SDM kebencanaan | |
| | | | 1.8 | Meningkatkan koordinasi penanganan dan penanggulangan bencana lintas sektor | |
| Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur | Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Permukiman | 2.1 | Peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman | 2.1 | Penyediaan PSU kawasan permukiman yang aman, nyaman dan berkelanjutan |
| | | | 2.2 | Fasilitasi penyediaan perumahan layak huni | |
| | Meningkatkan keselamatan transportasi darat | 2.2 | Meningkatkan Pelayanan Transportasi yang Prima | 2.3 | Pelaksanaan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku |
| | | 2.3 | Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas | 2.4 | Mengikuti lomba tata tertib transportasi dan lalulintas (lomba WTN) |
| | | 2.4 | Meningkatkan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Yang Memadai | 2.5 | Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan pihak-pihak terkait |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Terwujudnya kualitas air, udara dan tutupan lahan tidak melewati ambang batas yang sudah ditentukan | 3.1 | Peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan | 3.1 | Optimalisasi pengurangan sampah dan penanganan sampah |
| | | 3.2 | Pengarusutamaan perencanaan dan implementasi pembangunan rendah karbon | 3.2 | Peningkatan upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | 3.3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup |
| | | | 3.4 Peningkatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pendukung penurunan emisi gas rumah kaca |
| | | | 3.5 Pengendalian dan pengurangan beban pencemar |
| Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi | 4.1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi | 4.1 Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran |
| | | 4.2 Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan | 4.2 Peningkatan kualitas SPJ dan ketepatan verifikasi keuangan |
| | | 4.3 Meningkatkan pengawasan internal organisasi | 4.3 Meningkatkan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan |

4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Penetapan tujuan didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan dengan tujuan untuk memberikan arahan dalam menyusun perencanaan yang berkualitas oleh Dinas PRKPPLH Kabupaten Pasaman guna mewujudkan

akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Pasaman. Tujuan tersebut akan terwujud melalui penentuan sasaran yang ditetapkan secara nyata, spesifik dan terukur setiap tahunnya.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada periode 2021-2024 DPRKPPLH mempunyai 4 (empat) tujuan dan 5 (lima) sasaran sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Tahun
2021-2026

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke | | | | |
|-----|---|--|--|---|------|------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar | | Persentase capaian SPM layanan dasar bidang Perumahan Rakyat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Mewujudkan capaian SPM layanan dasar bidang Perumahan Rakyat | Persentase rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | pemerintah | | | | | |
| 2 | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur | | Persentase jalan yang berkesamatan | 52 | 57 | 63 | 69 | 75 |
| | | Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Permukiman | Rasio Permukiman layak huni | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatkan keselamatan transportasi darat | Persentase Nagari yang dilayani angkutan umum. | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 3 | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 74.65 | 74.94 | 75.23 | 75.52 | 75.81 |
| | | Terwujudnya kualitas air, udara dan tutupan lahan tidak melewati ambang batas yang sudah ditentukan | Indeks Kualitas Air (IKA) | 55.89 | 55.99 | 56.09 | 56.19 | 56.29 |
| | | | Indeks Kualitas Udara (IKU), | 90.18 | 90.29 | 90.40 | 90.51 | 90.62 |
| | | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 78.11 | 79.07 | 80.03 | 80.99 | 81.95 |
| 4 | Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | | Predikat Sakip | | | | | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB | BB | BB | BB | BB |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|----|----|----|----|----|
| | | organisasi | | | | | | |
| | | | Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

6. Program dan Kegiatan

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

- a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- e. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

2. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

- a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

- a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
 - a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
8. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

- a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin RPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
 - a. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 10. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 11. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 12. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
 - a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 13. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - a. Pengelolaan Persampahan
 14. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
- b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota
- e. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten / Kota
- f. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- g. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja
(Sesuai Renstra 2021-2026)

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2023 |
|------------|---|---|----------------------------|--------------------------|
| 1 | Mewujudkan Capaian SPM layanan dasar bidang perumahan rakyat | Persentase rumah layak huni bagi Korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah | % | 100 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Permukiman | Rasio Permukiman layak Huni | % | 100 |
| 3 | Meningkatkan keselamatan transportasi darat | Persentase Nagari yang dialayani angkutan umum | % | 68 |
| 4 | Terwujudnya kualitas air, udara dan tutupan lahan tidak melewati ambang batas yang sudah ditentukan | <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Air (IKA) • Indeks Kualitas Udara (IKU), • Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Indeks Indeks Indeks | 55,99 90,29 79,07 |
| 5 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi | Nilai evaluasi SAKIP | Nilai | BB |
| | | Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | % | 95% |

Program adalah kumpulan kegiatan - kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/

kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Adapun penjelasan lebih rinci program dan anggaran dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023

| No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Anggaran |
|-----------|---|----------------|
| A. | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | |
| 1. | Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan: Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 60.495.000 |
| 2. | Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan: Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan | 24.870.000 |
| 3. | Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana | 16.281.500.000 |
| 4. | Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 10.000.000 |
| 5. | Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | |
| | Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | 15.000.000 |
| | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi | 126.455.000 |

| | | |
|------------|--|---------------|
| | Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | |
| B. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| 6. | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.497.956.934 |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 148.050.000 |
| 7. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 52.847.000 |
| 8. | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 4.250.000 |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 45.284.700 |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 29.586.200 |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.796.000 |
| | Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7.450.000 |
| | Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 145.140.000 |
| 9. | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 43.540.840 |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.089.200.000 |
| 10. | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.500.000 |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | 174.275.200 |

| | | |
|------------|--|-------------|
| | Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |
| | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.800.000 |
| | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35.000.000 |
| C. | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 11. | Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 218.746.200 |
| D. | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 12. | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 50.000.000 |
| 13. | Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan: Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 63.363.500 |
| E. | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | |
| 14. | Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 101.996.900 |
| F. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | |
| 15. | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh | |

| | | |
|------------|--|---------------|
| | Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 47.235.500 |
| | Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 27.984.000 |
| G. | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | |
| 16. | Kegiatan Penyelenggaraan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan: Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 91.923.000 |
| H. | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | |
| 17. | Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan: Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 53.213.200 |
| I. | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | |
| 18. | Kegiatan Pengelolaan Sampah | |
| | Sub Kegiatan: Penganganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 2.400.861.916 |
| J. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | |
| 19. | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 4.628.949.072 |
| 20. | Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang | |

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| | Tipe C | |
| | Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 8.427.500 |
| 21. | Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 73.520.000 |
| | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor | 46.420.000 |
| 22. | Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | |
| | Sub Kegiatan: Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota | 155.635.000 |
| | Jumlah | 31.812.272.662 |

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Untuk Tahun 2023, implementasi Rencana Strategis 2021–2026 mencakup pelaksanaan 22 kegiatan dalam 10 program. Untuk melaksanakan aktivitas ini telah dianggarkan biaya sebesar Rp. 31.783.272.706,- Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman dalam tahun 2023 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2023 |
|------------|---|---|----------------------------|--------------------------|
| 1 | Mewujudkan Capaian SPM layanan dasar bidang perumahan rakyat | Persentase rumah layak huni bagi Korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah | % | 100 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Permukiman | Rasio Permukiman layak huni | % | 100 |
| 3 | Meningkatkan keselamatan transportasi darat | Persentase Nagari yang dialayani angkutan umum | % | 68 |
| 4 | Terwujudnya kualitas air, udara dan tutupan lahan tidak melewati ambang batas yang sudah ditentukan | <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Air (IKA) • Indeks Kualitas Udara (IKU), • Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Indeks Indeks Indeks | 55,99 90,29 79,07 |
| 5 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi | Nilai evaluasi SAKIP | Nilai | BB |
| | | Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | % | 95% |

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Tahun 2023

| No | PROGRAM | KEGIATAN |
|-----------|--|---|
| 1. | Program Pengembangan Perumahan | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab./Kota - Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 3. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota |

| | | |
|----|---|--|
| 4. | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
| 5. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota |
| 6. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 7. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyelenggaraan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| 8. | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| 9. | Program Pengelolaan Persampahan | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan Sampah |
| 10 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini, Berikut Analisis Pendukung

Tabel 3.1

| Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan Capaian SPM layanan dasar bidang perumahan rakyat | | | | |
|--|---|---------------|------------------|------------------|
| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Persentase rumah layak huni bagi Korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah | 100 % | 77,58 | 77,58 |
| Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Permukiman | | | | |
| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Rasio Permukiman layak huni | 100 % | 70,61 % | 70,61% |
| Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan keselamatan transportasi darat | | | | |
| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Persentase Nagari yang dilayani angkutan umum | 68% | 70% | 102,94% |
| Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya kualitas air, udara dan tutupan lahan tidak melewati ambang batas yang sudah ditentukan | | | | |
| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Indeks Kualitas Air (IKA) | 55,99 | 57,99 | 103,57% |
| 2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 90,29 | 93,38 | 103,08% |
| 3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 79,07 | 76,18 | 95,58 |

| Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi | | | | |
|--|---|---------------|------------------|------------------|
| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Nilai Evaluasi SAKIP | BB | 71,55 | BB |
| 2 | Persentase Capaian Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan | 95 % | 86,40% | 90,95% |

1) Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 2023 guna mewujudkan sasaran strategis, melalui pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan masing-masing kegiatan sebanyak 22 kegiatan dalam 10 program, terlihat pada Persentase Capaian Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan dengan realisasi capaian 89,81% walaupun serapan anggaran pada sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dengan anggaran Rp. 15.900.000.000,- terealisasi Rp. 11.059.028.542,- (69,55%). Rendahnya serapan anggaran sub kegiatan ini disebabkan karena :

- Sesuai dengan SK Bupati Pasaman Nomor 188.45/247/BUP-PAS/2022 tentang penetapan daftar rumah rusak dampak bencana alam gempa bumi di kabupaten pasaman. Dimana untuk jumlah rusak sedang berjumlah 545 unit dan rusak ringan 1416 unit rumah.
- Untuk rumah rusak sedang 545 unit telah dilakukan validasi dan verifikasi oleh TFL menjadi 457 unit rumah. Berkurangnya jumlah unit rumah rusak sedang disebabkan karena adanya data ganda, dan sebagian telah dibantu oleh program lain seperti BSPS, NJO dan lain-lain.
- Untuk Rumah rusak ringan yang berjumlah 1416 unit rumah, setelah dilakukan verifikasi dan validasi menjadi 1620 unit rumah. Setelah dilakukan sosialisasi,

pembentukan kelompok dan pembukaan rekening terdapat calon penerima bantuan rumah rusak ringan menolak menerima bantuan dikarenakan jumlah dana yang didapat tidak sesuai dengan keinginan penerima bantuan, adanyanya data ganda, rumah yang tidak masuk kategori (rumah dinas), rumah kosong dan rumah yang tidak ditemukan. Sehingga jumlah disalurkan untuk kategori rusak ringan sebanyak 993 unit

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir berikut Analisis Pendukung (tahun 2022-2023):

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2022-2023

| No | Indikator Kinerja | Target Kinerja sesuai Renstra (selama 5 tahun) | Pencapaian Kinerja Tahun 2022 | Pencapaian Kinerja tahun 2023 |
|-----------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Persentase rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah | 100 % | 100% | 79,58% |
| 2 | Rasio Permukiman layak huni | 100 % | 100% | 70,61% |
| 3 | Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 56,29 90,62 81,95 | 62,38 93,44 76,56 | 57,14 93,38 76,18 |
| 4 | Persentase Nagari yang dilayani angkutan umum. | 80% | 64% | 70% |
| 5 | Nilai evaluasi SAKIP Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | BB 95% | B 99,13% | B 86,40% |

Ada beberapa kinerja pada tahun 2023 lebih meningkat dari kinerja tahun 2022 dan ada juga kinerja pada tahun 2023 menurun dari kinerja tahun 2022 dapat kita lihat perbandingannya pada table 3.2.

Target capaian kinerja sesuai target kinerja pada Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Target Capaian Kinerja Tahun 2023

| No. | Indikator Kinerja | Target Tahun 2023 |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Persentase capaian SPM layanan dasar bidang Perumahan Rakyat | 100% |
| 2. | Rasio Permukiman Layak Huni | 100% |
| 3. | Persentase Nagari yang dilayani angkutan umum. | 68% |
| 4. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 74,94 |
| 5. | Nilai evaluasi SAKIP | BB |
| | Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | 95% |

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, berikut analisis pendukung

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023
(sesuai Renstra 2021-2026)

| No. | Indikator Kinerja | Target Tahun 2021-2026 | Akumulasi Kinerja S.d Tahun 2023 | % Pencapaian |
|-----|--|------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. | Persentase capaian SPM layanan dasar bidang Perumahan Rakyat | 100% | 77,58 | 77,58 |
| 2. | Rasio Permukiman Layak Huni | 100% | 70,61 | 70,61 |
| 3. | Persentase Nagari yang dilayani angkutan umum. | 80 | 67% | 83,75 |
| 4. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 74 | 76,72 | 103,68 |
| 5. | Nilai evaluasi SAKIP | BB | 71,55 | 80 |
| | Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan | 95% | 86,4 | 90,94 |

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun ini

| No | Indikator Kinerja | Target Kinerja sesuai Renstra (selama 5 tahun) | Akumulasi Kinerja s.d Tahun 2023 | % Capaian |
|----|---|--|----------------------------------|-----------|
| 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perumahan Permukiman | 5 | 3 | 60 |
| 2 | Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota | 100 | 100 | 100 |

| | | | | |
|----|---|--------|---------------|-------|
| 3 | Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota | 10 | 4 | 40 |
| 4 | Persentase terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 100 | 70,61 | 70,61 |
| 5 | Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin RPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten | 2 | 2 | 100 |
| 13 | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, | 53.999 | 19.132 Ton | 35,43 |

| | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|
| | Diproses Akhir di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota | | | |
| 14 | Persentase sarana dan prasarana jalan yang berkeselamatan | 80% | 74,8 | 93,5 |
| 15 | Persentase Terminal yang terkelola | 88% | 80 | 90,91 |
| 16 | Jumlah kendaraan bermotor yang diuji | 1.600 | 1.792 | 112 |
| 17 | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 12 | 12 | 100 |
| 18 | Persentase Administrasi Perkantoran yang dipenuhi | 100 | 100 | 100 |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

a) Indikator Kinerja Persentase capaian SPM layanan dasar bidang Perumahan Rakyat

Indikator Standar Nasional Pelayanan Minimal Layanan Dasar adalah 100% pada setiap terjadi bencana sampai tenggang waktu 3 tahun setelah terjadi bencana. Realisasi kinerja capaian Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar Tahun 2023 adalah sebesar 79,58 %. Masih ada waktu 2 tahun lagi untuk pencapaian sampai 100%. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang standar teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa pemenuhan SPM dapat dilakukan 3 tahun sejak kejadian bencana

b) Indikator Kinerja Persentase nagari yang dilayani angkutan umum.

Tidak ada standar nasional untuk indikator kinerja ini.

c) Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Realisasi kinerja Tahun 2023 lebih tinggi dari pada standar nasional. Untuk nasional nilai IKLH 72,54 sedangkan nilai IKLH Kabupaten Pasaman 75,99

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja atau alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Penyebab Keberhasilan

- Ketersediaan anggaran dan dukungan dari Pemerintah Daerah Tentang Penyelesaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Terlaksananya kerjasama dengan Kementerian LH yang difasilitasi Provinsi. Hasil pengukuran udara Passive sampler yang dilakukan 2 (dua) kali setahun yang menghasilkan data pencemaran udara di Kabupaten Pasaman di bawah angka baku mutu di beberapa titik lokasi (pencemaran udara Pasaman baik / belum tercemar). Selain itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) melebihi target yang telah ditetapkan disebabkan karena nilai Indeks untuk IKU (Indeks Kualitas Udara) meningkat dari Tahun lalu.
- Memiliki Sumber Daya Manusia pegawai yang memiliki kompetensi Transportasi Darat dan Manajemen Transportasi Jalan.

b. Penyebab Kegagalan

- Pencapaian Indikator Kinerja, capaian SPM layanan dasar bidang Perumahan Rakyat di Dinas PRKPPLH Kab. Pasaman memperoleh capaian kinerja yang masih rendah disebabkan Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana. Anggaran Sub Kegiatan ini

sebesar Rp. 16.281.500.000- dan realisasi keuangannya sebesar Rp.11.439.022.242 atau 70,26%, direalisasikan untuk Bantuan rumah masyarakat terdampak gempa yang rusak sedang dan rusak ringan Rendahnya serapan anggaran sub kegiatan ini disebabkan karena :

- Sesuai dengan SK Bupati Pasaman Nomor 188.45/247/BUP-PAS/2022 tentang penetapan daftar rumah rusak dampak bencana alam gempa bumi di kabupaten pasaman. Dimana untuk jumlah rusak sedang berjumlah 545 unit dan rusak ringan 1416 unit rumah.
 - Untuk rumah rusak sedang 545 unit telah dilakukan validasi dan verifikasi oleh TFL menjadi 457 unit rumah. Berkurangnya jumlah unit rumah rusak sedang disebabkan karena adanya data ganda, dan sebagian telah dibantu oleh program lain seperti BSPS, NJO dan lain-lain.
 - Untuk Rumah rusak ringan yang berjumlah 1416 unit rumah, setelah dilakukan verifikasi dan validasi menjadi 1620 unit rumah. Setelah dilakukan sosialisasi, pembentukan kelompok dan pembukaan rekening terdapat calon penerima bantuan rumah rusak ringan menolak menerima bantuan dikarenakan jumlah dana yang didapat tidak sesuai dengan keinginan penerima bantuan, adanya data ganda, rumah yang tidak masuk kategori (rumah dinas), rumah kosong dan rumah yang tidak ditemukan. Sehingga jumlah disalurkan untuk kategori rusak ringan sebanyak 993 unit.
- Pada indikator Persentase Nagari yang dilayani angkutan umum secara umum faktor penghambat pencapaian target

atau faktor kegagalan pencapaian target adalah Permasalahan data yang belum sempurna baik dari segi kuantitas maupun kualitas, bahwa kebutuhan penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Pasaman belum terdata secara keseluruhan di setiap ruas jalan Kabupaten serta jenis-jenis perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung indikator kinerja “Jalan yang berkeselamatan”.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Terlaksananya beberapa Indikator kinerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga target yang direncanakan sesuai capaian dan penggunaan anggaran menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas dan skala prioritas penyerapan anggaran dan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja uraiannya sebagai berikut :

a. Faktor penunjang keberhasilan pencapaian sasaran

- Terlaksananya pencapaian target Pemantauan Kualitas Pencemaran Air yang menghasilkan data Pencemaran Air Sungai di bawah baku mutu (belum tercemar)
- Ketersediaan Anggaran
- Dukungan Dari Pemerintah Daerah Tentang Penyelesaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia pegawai yang memiliki kompetensi

b. Faktor penunjang kegagalan pencapaian sasaran

-

c. Hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi Tahun 2023

- Terjadinya bencana alam gempa bumi pada awal tahun 2022 yang mengakibatkan banyaknya rumah penduduk yang terdampak bencana alam tersebut dan belum bisa disalurkan bantuan penanganan dampak bencana untuk rumah yang rusak ringan dan rusak sedang karena bertentangan dengan regulasi yang ada.

Dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang PRKP dimana masih banyak juga terdapat hambatan atau kendala dan juga permasalahan secara umum antara lain:

- 1) Perkembangan permukiman dimasing masing kecamatan memiliki kesenjangan yang cukup tinggi dari pusat ibu kota. Kepadatan yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan prasarana lingkungan yang memadai sehingga muncul masalah permukiman kumuh
- 2) Masih banyaknya data RTLH yang belum tertangani
- 3) Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah rumah sehingga Backlog rumah semakin tinggi
- 4) Masih adanya permukiman atau rumah yang berada di daerah rawan bencana (negative list)
- 5) Minimnya data untuk penyelenggaraan kawasan permukiman
- 6) Kurang optimalnya PSU di Perumahan dan Permukiman
- 7) Belum terkelolanya Kawasan kumuh dibawah 10 Ha
- 8) Keterbatasan lahan untuk pengembangan Perumahan dan juga daya beli dari masyarakat berpenghasilan rendah
- 9) Belum adanya Data RP3KP

10) Tidak adanya data PSU

- Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Persampahan
- Masih kurangnya tenaga kebersihan yang ada saat ini.
- Belum adanya TPA di Kabupaten Pasaman yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Masih kurangnya perlengkapan jalan seperti rambu-rambu, marka jalan dan pagar pengaman jalan di beberapa kecamatan dalam wilayah Kab. Pasaman terutama di Kecamatan Panti.
- Belum adanya acuan dan standar dalam penegakan hukum di bidang Perhubungan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang Perhubungan (Transportasi).
- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dalam berlalu lintas.
- Belum terpenuhinya seluruh pemeliharaan lampu jalan umum karena masih minimnya anggaran untuk pemeliharaan lampu jalan umum.
- Sarana dan prasarana untuk lampu jalan umum yang kurang memadai seperti kendaraan Crane yang sudah kurang keamanannya dalam pengoperasiannya.

d. Langkah - Langkah Antisipatif yang diambil

- Perlunya penambahan anggaran guna pengembangan/ kegiatan pada masing - masing bidang, terutama bidang kebersihan dan pertamanan serta bidang Perhubungan.
- Memaksimalkan SDM yang ada untuk penunjang kegiatan di semua bidang.
- Adanya rencana pembangunan TPA yang layak di Kecamatan Panti

7. Evaluasi Capaian Kinerja

Setiap bulannya diadakan rapat dalam rangka evaluasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

B. Realisasi Anggaran

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman menjalankan urusan wajib yakni, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Perhubungan dan urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman. Dimana dalam melaksanakan urusan ini terdiri dari 10 program prioritas, 22 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahun 2023 ini secara fisik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Telah berhasil merealisasikan Fisik sebesar 89,81% dan realisasi keuangan 83,00%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|---|--|---|---|----------------|----------------|------------|
| 1 | Tercapainya standar pelayanan minimal layanan dasar | Mewujudkan capaian SPM layanan dasar bidang Perumahan Rakyat | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | |
| | | | A Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program | | | |
| | | | 1 Sub Kegiatan: Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program | 60,495,000 | 58,000,400 | 95.88 |
| | | | B Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | |
| | | | 2 Sub Kegiatan: Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan | 24,870,000 | 22,249,800 | 89.46 |
| | | | C Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program | | | |
| | | | 3 Sub Kegiatan: Rehabilitasi Rumah Bagi Korban | 16,281,500,000 | 11,439,022,242 | 70.26 |
| | | | D Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program | | | |
| | | | 4 Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi | 10,000,000 | 6,919,550 | 69.20 |
| | | | E Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | |
| 5 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | 15,000,000 | 12,940,650 | 86.27 | | | |
| 6 Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan | 126,455,000 | 124,612,680 | 98.54 | | | |
| 2 | Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | |
| | | | A Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| | | | 1 Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4,497,956,934 | 4,331,573,071 | 96.30 |
| | | | 2 Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan | 148,050,000 | 121,545,000 | 82.10 |
| | | | B Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat | | | |
| | | | 3 Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 52,847,000 | 52,258,000 | 98.89 |
| | | | C Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| | | | 4 Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 4,250,000 | 4,250,000 | 100.00 |
| | | | 5 Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | 45,284,700 | 45,123,000 | 99.64 |
| | | | 6 Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan | 29,586,200 | 23,510,400 | 79.46 |
| | | | 7 Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12,796,000 | 12,730,000 | 99.48 |
| | | | 8 Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu | 7,450,000 | 7,450,000 | 100.00 |
| | | | 9 Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 145,140,000 | 141,418,900 | 97.44 |
| | | | D Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | | | 10 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 43,540,840 | 25,940,982 | 59.58 |
| 11 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 2,089,200,000 | 2,006,792,288 | 96.06 | | | |
| E Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | |
| 12 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24,500,000 | 24,400,000 | 99.59 | | | |
| 13 Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 174,275,200 | 159,595,700 | 91.58 | | | |
| 14 Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 15,800,000 | 14,747,000 | 93.34 | | | |
| 15 Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan | 35,000,000 | 34,990,000 | 99.97 | | | |
| 3 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Terwujud nya kualitas air, udara dan tutupan lahan tidak melewati ambang batas yang sudah di tentukan | I PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | A Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | | | |
| | | | 1 Sub Kegiatan: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 218,746,200 | 176,004,700 | 80.46 |
| | | | II PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | B Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | |
| | | | 2 Sub Kegiatan: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 50,000,000 | 27,872,000 | 55.74 |
| | | | C Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | |
| 3 Sub Kegiatan: Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 63,363,500 | 51,841,505 | 81.82 | | | |
| | | | III PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | D Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | | |
| | | | 4 Sub Kegiatan: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 101,996,900 | 99,201,000 | 97.26 |
| | | | IV PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANTERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | |
| | | | E Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | | | |
| | | | 5 Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 47,235,500 | 43,788,450 | 92.70 |
| | | | 6 Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 27,984,000 | 24,631,850 | 88.02 |
| | | | V PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | |
| | | | F Kegiatan Penyelenggaraan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | | 7 Sub Kegiatan: Pendampingan Gerakan Peduli | 91,923,000 | 76,405,350 | 83.12 |
| | | | VI PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | |
| | | | G Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | | 8 Sub Kegiatan: Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan | 53,213,200 | 43,759,320 | 82.23 |
| | | | VII PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | |
| | | | H Kegiatan Pengelolaan Sampah | | | |
| | | | 9 Sub Kegiatan: Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA | 2,400,861,916 | 2,323,978,354 | 96.80 |
| 4 | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur | Meningkatkan keselamatan transportasi darat | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | |
| | | | A Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota | | | |
| | | | 1 Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 4,628,949,072 | 4,590,916,721 | 99.18 |
| | | | B Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | |
| | | | 2 Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 8,427,500 | 5,707,500 | 67.72 |
| | | | C Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | |
| | | | 3 Sub Kegiatan: Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 73,520,000 | 72,840,900 | 99.08 |
| | | | 4 Sub Kegiatan: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor | 46,420,000 | 46,390,000 | 99.94 |
| | | | D Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | |
| | | | 5 Sub Kegiatan: Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota | 155,635,000 | 149,869,000 | 96.30 |
| | | | Jumlah | 31,812,272,662 | 26,403,276,313 | 83.00 |

Uraian dari tabel diatas dijelaskan dibawah ini :

A. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 60.495.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp.58.000.400,- atau 95,88% direalisasikan untuk biaya operasional mendata rumah di lokasi bencana dan relokasi program kabupaten.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan. Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp.24.870.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp.22.249.800,- atau 89,46%, direalisasikan untuk pelaksanaan sosialisasi ke daerah penerima bantuan dampak bencana alam.
- 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana. Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 16.281.500.000- dan realisasi keuangannya sebesar Rp.11.439.022.242 atau 70,26%, direalisasikan untuk Bantuan rumah masyarakat terdampak gempa yang rusak sedang dan rusak ringan Rendahnya serapan anggaran sub kegiatan ini disebabkan karena :
 - Sesuai dengan SK Bupati Pasaman Nomor 188.45/247/BUP-PAS/2022 tentang penetapan daftar rumah rusak dampak bencana alam gempa bumi di kabupaten pasaman. Dimana untuk jumlah rusak sedang berjumlah 545 unit dan rusak ringan 1416 unit rumah.
 - Untuk rumah rusak sedang 545 unit telah dilakukan validasi dan verifikasi oleh TFL menjadi 457 unit rumah. Berkurangnya jumlah unit rumah rusak sedang disebabkan karena adanya data ganda, dan sebagian telah

dibantu oleh program lain seperti BSPS, NJO dan lain-lain.

- Untuk Rumah rusak ringan yang berjumlah 1416 unit rumah, setelah dilakukan verifikasi dan validasi menjadi 1620 unit rumah. Setelah dilakukan sosialisasi, pembentukan kelompok dan pembukaan rekening terdapat calon penerima bantuan rumah rusak ringan menolak menerima bantuan dikarenakan jumlah dana yang didapat tidak sesuai dengan keinginan penerima bantuan, adanyanya data ganda, rumah yang tidak masuk kategori (rumah dinas), rumah kosong dan rumah yang tidak ditemukan. Sehingga jumlah disalurkan untuk kategori rusak ringan sebanyak 993 unit.

4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp.10.000.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp.6.919.550,- atau 69,20% direalisasikan untuk pelaksanaan monitoring bantuan rumah yang telah selesai dilaksanakan. Pada kegiatan ini, perjalanan dinas bisa tidak terpakai karena pekerjaan fisik rumah rusak ringan dan sedang baru selesai pada akhir Desember 2023. Sehingga koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perkimtan dan Bappeda Provinsi Sumbar tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka.

5) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik. Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp.15.000.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp.12.940.650,- atau 86,27%, untuk koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik

6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 126.455.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp.124.612.680,- atau 98,54%, direalisasikan untuk penyusunan dokumen RP3KP (Rencana Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan)

B. Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan anggaran Rp.218.746.200,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 176.004.700,- atau 80,46%. Kegiatan ini direalisasikan untuk penyusunan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota.
- 2) Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 63.363.500,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 51.841.505,- atau 81,82%. Kegiatan ini direalisasikan untuk penyusunan laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan anggaran sebesar Rp. 47.235.500,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 43.788.450,- atau 92,70%. Kegiatan ini direalisasikan untuk pelaksanaan pemenuhan ketentuan perizinan (Amdal/UKL UPL/SPPL)
- 4) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.27.984.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 24.631.850,- atau 88,02%. Kegiatan ini direalisasikan

untuk pelaksanaan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang telah mempunyai izin lingkungan.

- 5) Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 91.923.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 76.405.350,- atau 83,12%. Kegiatan ini direalisasikan untuk pelaksanaan penilaian Adipura dan Proklamasi
- 6) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 53.213.200,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 43.759.320,- atau 82,23%. Kegiatan ini direalisasikan untuk pelaksanaan penilaian Adiwiyata Kalpataru.

C. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan anggaran sebesar Rp. 101.996.900,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 99.201.000,- atau 97,26%. Kegiatan ini direalisasikan untuk pembersihan dan pemeliharaan taman-taman disepanjang jalan di kecamatan Lubuk Sikaping seluas 3,88Ha dan perencanaan Taman Hutan Kota
- 2) Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.400.861.916,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.323.978.354,- atau 96,80. Kegiatan ini direalisasikan untuk operasional penanganan Sampah, belanja jasa penanganan sampah untuk Kec Panti dan Rao, Pemeliharaan becak motor,

kendaraan truk, excavator serta belanja modal pengadaan Becak Motor 3 Unit, Container 2 unit, Rehab Sarana dan Prasarana TPA Puncak Labuai

D. Bidang Perhubungan

- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 4.628.949.027,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 4.590.916.721,- atau 99,18%. Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran tagihan listrk PJU, APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) sebanyak 1 unit, Lampu PJU sebanyak 939 buah untuk 12 Kecamatan dan pengadaan cermin tikungan sebanyak 3 unit.
- 2) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) dengan anggaran sebesar Rp. 8.427.400 terealisasi sebesar Rp.5.707.500,- atau 67,72%. Perencanaan awal kegiatan ini gunakan untuk pemeliharaan terminal Benteng dan terminal Panti. Namun setelah dilakukan pengecekan ulang ternyata lebih diprioritaskan untuk pemeliharaan terminal Benteng. Sehingga biaya perjalanan dinas dan BBM pada kegiatan ini tidak terealisasi yang menyebabkan rendahnya realisasi keuangan.
- 3) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp 155.635.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 149.869.000,- atau 96,30%.
 - Kegiatan ini direalisasikan untuk melaksanakan wasdal angkutan pedesaan, perparkiran serta arus lalu lintas disepanjang kawasan pasar Rao, pasar inpres Tapus, pasar inpres Kumpulan dan pasar Ladang Panjang.
 - Melakukan Wasdal Angkutan Lebaran Operasi Ketupat Singgalang Tahun 2023

- Melakukan operasi gabungan bersama TNI, Polri, Samsat dan Perhubungan di wilayah hukum Resort Pasaman
- Melakukan Wasdal dalam kota kecamatan Lubuk Sikaping.

E. UPT Laboratorium

Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 27.872.000,- atau 55,74%. Kegiatan ini direalisasikan untuk pengambilan sampel guna pemeriksaan pencemaran terhadap Media Tanah, Air dan Udara di 65 titik lokasi di 12 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pasaman dengan hasil :

- Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2023 yaitu 57,99
- Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2023 yaitu 93,38
- Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2023 yaitu 76,18

Dari hasil indeks diatas maka didapat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebesar 75,85 yang berarti Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman masih bersih dan belum tercemar. Rendahnya realisasi pada kegiatan ini disebabkan karena Pada tahun 2023 tidak terdapat kerusakan pada alat labor sehingga anggaran pemeliharaan alat labor tidak direalisasikan.

F. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

1) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Anggaran sebesar Rp. 73.520.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 72.840.900,- atau 99,08%.

Kegiatan ini direalisasikan untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 1.631.

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Anggaran sebesar Rp.46.420.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 46.390.000,- atau 99,94%. Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor sebanyak 3 unit dan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor sebanyak 8 unit.

G. Sekretariat

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 4.497.956.934,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 4.331.573.071,- atau 96,30%. Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 148.050.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 121.454.000,- atau 82,10%. Kegiatan ini direalisasikan untuk Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan.

3) Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 52.847.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 52.258.000 atau 98,89% Kegiatan ini direalisasikan untuk pembelian mantel hujan untuk petugas kebersihan sebanyak 87 stel, pakaian kerja lapangan untuk petugas kebersihan 85 stel dan Pakaian Sipil harian untuk petugas PJU sebanyak 11 stel.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 4.250.000,- dan realisasi

keuangannya sebesar Rp. 4.250.000,- atau 100%. Kegiatan ini direalisasikan untuk pembelian komponen-komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

5) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 45.284.700,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 45.123.000,- atau 99,64%. Kegiatan ini direalisasikan untuk penyediaan alat tulis kantor, bahan cetak dan perlengkapan dinas.

6) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 29.586.200,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 23.510.400,- atau 79,46%. Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja bahan cetak.

7) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 12.796.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 12.730.000,- atau 99,48%. Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran langganan surat kabar kantor.

8) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 7.450.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 7,450.000,- atau 100%. Kegiatan ini direrealisasi untuk makanan dan minuman tamu serta untuk makanan dan minuman rapat.

9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 145.140.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 141.418.900,- atau 97,44%. Kegiatan ini direalisasikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan keluar daerah.

10) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 43.540.840,- dan

realisasi keuangannya sebesar Rp. 25.940.982,- atau 59,58 %.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembayaran tagihan telepon, air dan listrik kantor.

- 11) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.089.200.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.006.792.288,- atau 96,06%.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembayaran gaji tenaga kontrak serta pembayaran jaminan kesehatan dan kematian pegawai kontrak.

- 12) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp.24.500.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp.24.400.000,- atau 99,59%.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembayaran pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan kepala dinas.

- 13) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.174.275.200,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp.159.595.700,- atau 91,58%.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembayaran pajak kendaraan dan pemeliharaan kendaraan operasional dinas dan lapangan.

- 14) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 15.800.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 14.747.000,- atau 93,34%.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Pemeliharaan Komputer Unit dan Personal Computer.

15) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 34.990.000,- atau 99,97%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas PRKPPLH Kabupaten Pasaman dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Pada tahun 2023 Dinas PRKPPLH Kabupaten Pasaman menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai.

Dinas PRKPPLH Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan sebanyak 10 program prioritas 22 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 31.812.272.662,- dengan realisasinya sebesar Rp. 26.403.276.313,- atau 83% dan realisasi fisik 89,81%

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Lubuk Sikaping, Januari 2024

Kepala Dinas PRKPPLH

Kabupaten Pasaman


SILFIA EVAYANTI, S.Pi, MM
NIP. 19680105 199403 2 004